



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIFTAHUL HUDA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 820273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.865.000.000**

1. Tanah Seluas 6120 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 6330 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000
4. Tanah Seluas 7696 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 3174 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 277 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 360.000.000
7. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
8. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
9. Tanah Seluas 292 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.760.000.000
11. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL



SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

26.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA NF12A1CF M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

11.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

129.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

5.031.500.000

III. HUTANG

Rp.

100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.931.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.